**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ADAT YANG
DIJADIKAN TAMBANG ILEGAL****Cindy Sumampouw¹, Stince Sidayang², Susi Manangin³**
¹²³ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: Cindygraseilasumampouw@unima.ac.id No. Telp:
[,stincesidayang@unima.ac.id](mailto:stincesidayang@unima.ac.id)
[,susiarianimanangin@gmail.com](mailto:susiarianimanangin@gmail.com)

Submitted 4 Maret 2025

Accepted 9 Maret 2025

Published 10 Maret 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Adat Yang DiJadikan Tambang Ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum dalam memberi kepastian dan keamanan serta menjamin kehidupan masyarakat yang baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan tentang kepemilikan hak atas tanah adat dan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang menjadi tambang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan dokumen resmi terkait dengan hak atas tanah adat yang menjadi tambang ilegal. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran serta fungsi Hukum dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menjamin pemilikan hak atas tanah adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hak kepemilikan tanah adat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Meskipun demikian dalam berjalanya waktu demi waktu perlindungan yang diberikan harus membawa kepastian yang lebih baik lagi, demikian juga untuk lembaga yang ada yaitu BPN juga harus diawasi secara internal dan eksternal agar terdapat keseimbangan terhadap kinerja lembaga pemerintahan tersebut.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, tanah adat, tambang ilegal.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta.

Dengan adanya UUPA, maka seharusnya terwujudnya suatu hukum agraria nasional, yang memberikan pedoman bagi seluruh rakyat dan menuntun tercapainya cita-cita rakyat. Secara substansi UUPA berkedudukan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia yang disebabkan karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat.

Dengan diberlakukannya UUPA ini merupakan suatu jalan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku. Perkembangan situasi pertanahan di Indonesia saat ini dapat dikatakan merupakan hal krusial dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia, seperti dalam merencanakan bangunan, menyiapkan Perusahaan, tempat penghidupan, dan sebagainya yang melibatkan individu, serta fungsi kepemilikan tanah oleh individu dianggap sah secara hukum dengan adanya peraturan hukum yang melindunginya. Pengakuan dan proteksi yang dilaksanakan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat tercatat Pada Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa, “semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak atas tanah merupakan hak untuk manusia menguasai tanah yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup seseorang ataupun keluarga oleh sebab itu dapat diberikan kepada orang lain maupun badan hukum yang ada. Untuk itu, Hak atas Tanah adalah hak fundamental yang sangat penting bagi masyarakat demi kehidupan yang martabat dan kebebasan dalam masyarakat. Di sisi lain, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas Tanah, meskipun hak tersebut masih dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terutama negara.¹

Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan.² Didalam konteks ini tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan suatu kelompok sepanjang masa. Ini bersifat religius antara hukum masyarakat bersama hukum adat dengan tanah ulayatnya. Adapun kegunaan dari tanah ulayat atau tanah bersama yang dipimpin oleh kepala adat dan masyarakat hukum adat misalnya dari tanah lapang, hutan, dan sebagainya adalah untuk tanah untuk pasar, penggembalaan tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat.³

Keberadaan Masyarakat hukum adat dikenal dan dihormati eksistensinya oleh konstitusi, hal ini tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hal tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sengketa atas Tanah tidak dapat di hindari pada masa sekarang ini. Hal ini memerlukan perbaikan peraturan dan penggunaan lahan untuk kepentingan masyarakat lokal dan yang terpenting kepastian hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan secara dini guna menghindari penumpukan sengketa pertanahan yang dapat mengakibatkan Tanah tidak dapat digunakan dan berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Karena itu, terdapat dua cara penyelesaian sengketa: penyelesaian sementara proses arbitrase melalui sengketa peradilan, dan prosedur penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan. Kesepakatan konsultatif yang dicapai melalui proses hukum biasanya tidak mempertimbangkan kepentingan bersama, cenderung menambah persoalan baru, dan lambat dalam penyelesaiannya. Di sisi lain, melalui proses penyelesaian, kita dapat mencapai kesepakatan sebagai “win-win solution”, menyelesaikan masalah bersama secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik.⁴

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, tidak seimbang antara jumlah penduduk dan lahan yang tersedia, sehingga meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk, lahan yang tersedia masih terbatas dan kepentingan terpisah yang dapat menimbulkan masalah dan konflik. Permasalahan pertanahan merupakan hal dasar bagi manusia.⁵ Permasalahan tanah adat di Indonesia menjadi isu yang kompleks karena

¹ Nia Kurniati, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016: 207-217, hlm. 208,

² Ilyas Ismail (2010), *Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Kanun No. 50

³ Ahdiana Yuni Lestari(2019), *Hukum adat*, Hal. 100

⁴ *Ibid.*

⁵ Soedharyo Soimin, *Hak dan Pengadaan Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 82.

melibatkan hak-hak masyarakat adat yang seringkali terabaikan oleh pembangunan dan investasi.

Maraknya kegiatan investasi juga ada pada sektor pertambangan, banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha baik dengan izin maupun tanpa izin, kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup, oleh karena lahan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di bidang pertambangan, maka tak jarang kegiatan ini juga mengesampingkan tanah ulayat masyarakat adat yang telah ada.

Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam putusan pengadilan menjatuhkan Terdakwa yang melakukan pertambangan Tanpa izin diwilayah tanah salah satu masyarakat adat dengan dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan contoh kasus diatas menggambarkan bahwa kehadiran Negara yang belum maksimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat satu judul penelitian yaitu: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Yang Dijadikan Tambang Ilegal.**

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa hak ulayat masyarakat adat penting untuk dilindungi?
2. Bagaimana perlindungan hak bagi hak ulayat Masyarakat adat yang dijadikan lokasi tambang ilegal?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi hak ulayat Masyarakat adat yang dijadikan Lokasi tambang ilegal.
2. Untuk mengetahui mengapa hak masyarakat adat penting untuk dilindungi.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado (UNIMA).

b) Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan dibidang hukum atau melakukan pembaharuan atas peraturan undang-undang didalamnya, agar setidaknya sekurang-kurangnya dapat mengurangi terjadinya kasus tentang Pertanahan

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap warga atau masyarakat yang ada disekitar untuk lebih memperhatikan pertambangan yang dilakukan oleh orang lain di tanah mereka.

2. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang penyelesaian pertanahan yang menjadi pertambangan ilegal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan dan

menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya di pergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁶

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Atas dasar isu hukum yang terkandung dalam penelitian ini maka, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada 2 (dua) pendekatan yaitu :(1) pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dipakai untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan pertambangan dan Masyarakat adat Sedangkan (2) pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dipakai untuk mempelajari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan penyalagunaan lahan masyarakat adat untuk kegiatan pertambangan

Sumber Hukum

Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Sumber hukum primer yang relevan dalam topik Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Dijadikan Tambang ilegal.

- Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan.
 - 4) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional (BPN).
 - 5) Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Sumber hukum sekunder adalah literatur atau referensi yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar mengenai sumber hukum primer. Sumber ini penting untuk memperdalam pemahaman terhadap topik penelitian. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) buku-buku hukum
- 2) jurnal-jurnal hukum
- 3) literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Sumber hukum tersier adalah referensi yang memberikan informasi tambahan yang mendukung penelitian, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Sumber ini berguna untuk memperluas wawasan dan memberikan gambaran umum terkait topik penelitian. Sumber hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum: Kamus yang menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini, seperti "hak ulayat", "tambang ilegal", dan "perlindungan hukum"
- 2) Ensiklopedia hukum: Ensiklopedia yang memberikan definisi dan konteks hukum terkait hak atas tanah, masyarakat adat, dan kegiatan pertambangan.

⁶ *Ibid. slide. 59*

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis- sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan-peraturan perundangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penejelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda. Peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tersebut tidak saling tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah.⁷

PEMBAHASAN

Pentingnya Hak Ulayat Masyarakat Adat untuk dilindungi

Hak ulayat masyarakat adat merupakan salah satu bentuk penguasaan tanah yang memiliki nilai filosofis, sosial, dan historis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.⁸ Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga mencerminkan identitas kolektif, keberlanjutan tradisi, dan hubungan spiritual dengan alam. Perlindungan terhadap hak ulayat menjadi sangat penting karena menyangkut berbagai aspek fundamental yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, lingkungan, dan pelaksanaan hukum yang adil.

Bagi masyarakat adat, tanah ulayat bukan sekadar aset materi, tetapi merupakan warisan nenek moyang yang mengandung nilai-nilai budaya, tradisi, dan spiritualitas. Tanah ulayat melambangkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dan wilayah adatnya, yang telah terbentuk melalui sejarah panjang. Kehilangan tanah ulayat berarti kehilangan identitas dan warisan budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks hukum, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan konstitusi terhadap hak ulayat sebagai bagian dari identitas masyarakat adat yang harus dilindungi.

Tanah ulayat menjadi sumber utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat mengandalkan tanah ulayat untuk bertani, berkebun, berburu, dan mengambil hasil hutan. Tanah ulayat juga menyediakan akses terhadap sumber daya alam seperti air, kayu, dan bahan pangan lainnya yang digunakan untuk keberlangsungan hidup

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung, 2010.

⁸ Ega Pribadi, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, Anggraeni Puspitasari (2024) *Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat*.

sehari-hari. Ketika tanah ulayat digunakan untuk aktivitas yang merusak, seperti pertambangan ilegal, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya yang vital ini. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada keberlangsungan hidup generasi mendatang. perlindungan hak ulayat adalah upaya nyata untuk menjamin hak dasar masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Hak ulayat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), dinyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki secara tradisional. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat dilindungi dari ancaman eksternal, termasuk eksploitasi oleh perusahaan atau individu yang tidak bertanggung jawab.⁹

Perlindungan Hukum Bagi Hak Ulayat Masyarakat Adat Yang Dijadikan Lokasi Tambang Ilegal

Hak ulayat sering terancam oleh kegiatan pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Untuk melindungi hak-hak tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam konteks pertambangan ilegal, masyarakat adat memiliki hak untuk menolak dan melaporkan kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah dan pusat berkewajiban untuk menindak tegas pelaku pertambangan ilegal dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati. Selain itu, masyarakat adat dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal di wilayah mereka. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga dan melindungi hak ulayat masyarakat adat dari ancaman pertambangan ilegal, guna memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat yang menjadi sasaran tambang ilegal merupakan isu krusial yang memerlukan pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, dasar hukum perlindungan tanah adat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta berbagai peraturan daerah (Perda) yang mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah mereka. Perda memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan aturan yang melarang eksploitasi tambang ilegal serta mengatur mekanisme perizinan dan pengawasan yang ketat. Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasinya sering kali menemui berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka.

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD -1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan

⁹ Muh Zulkifli Muhdar, Jasmaniar Jasmaniar (2021) *Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945*. Indonesian Journal of Criminal Law.

¹⁰ Imamulhadi. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara*, Bandung: Unpad Press.

menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak -hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Hal ini menunjukkan bahwa Negara RI menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, termasuk pemerintahan dan hukum dalam sistem hukum Adat, hak-hak ekonomi dan lingkungan masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan lain sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan, pemerintah dan perusahaan tambang harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat dalam setiap tahapan kegiatan tambang. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan tambang juga harus diberikan. Diperlukan juga pemberian ganti rugi yang layak dan memadai bagi masyarakat adat atas penggunaan tanah dan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, diharapkan hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan dapat terpenuhi dan lingkungan hidup di wilayah adat dapat tetap terjaga.

KESIMPULAN

1. Hak ulayat masyarakat adat memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Tanah ulayat tidak hanya menjadi aset ekonomi yang menopang kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki makna budaya, spiritual, dan ekologis yang mendalam.
2. Perlindungan terhadap hak ulayat juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai regulasi nasional lainnya. Dengan melindungi hak ulayat, negara turut melindungi keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dari keberagaman bangsa Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah perlu mempercepat pengakuan formal terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui penyusunan peraturan daerah atau kebijakan nasional yang jelas, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat adat. Langkah ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal mereka.
2. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Penindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal, termasuk pemberian sanksi pidana dan perdata, perlu diiringi dengan langkah-langkah pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tersebut. Pemerintah juga perlu menyediakan pendampingan hukum bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sidharta. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 69
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*", Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24
- John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice, London: Oxford University press*", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h. 118
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.
- Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. “*Penelitian Hukum*”, kencana J1. Tamba Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta. 2017 hal. 52
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 17.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *bab-bab tentang penemuan hukum*, PT. Citra Salim, H. S. “*Hukum pertambangan di Indonesia.*” (2006), hlm 13
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum & penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27-83
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Susmiyati, H. R., & Al Hidayah, R. (2021). *Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Dinamisia:
- Jurnal**
- ADCO Law, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat*, Jakarta Selatan, ADCO Law, 2022,
- Akhmaddhian, S. (2013). *Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* (Studi di Kabupaten Kuningan). Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 446-456
- Bayo, R., Wijaya, A.U., & Hadi, F. (2023). *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.
- Ega Pribadi, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, Anggraeni Puspitasari (2024) *Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat*.
- Laike, R. J. (2019). *Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan, 3(1), 23-30.
- Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*”, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.71
- Muh Zulkifli Muhdar, Jasmaniar Jasmaniar (2021) *Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945*. Indonesian Journal of Criminal Law. Diakses
- Muh Zulkifli Muhdar, Jasmaniar Jasmaniar (2021) *Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945*. Indonesian Journal of Criminal Law.

Muhammad Yamin dan Zaidar. (2018). “*Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 13 No 2. Hlm. 6.

Nia Kurniati, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*,

Sunaryo, *Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme*, 2018 PPE-UNIKA ATMA JAYA, Jakarta, RESPONS volume 23 no. 01

Wayan Resmi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Civius vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 11

Perundang-undangan :

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan,

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kitab Undang-Undang KUHper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.372

Peraturan Presiden No. 20/2015 tentang Badan Pertahanan Nasional (BPN)

Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan Sengketa Pertanahan